

PERANAN PENGELUARAN PEMERINTAH DALAM
PERTUMBUHAN EKONOMI DI ERA ORDE BARU DAN
ERA REFORMASI

* Budi Indrawati, SE, MM

Abstraksi

Untuk menaikkan pembangunan ekonomi membutuhkan dana relative besar, sedangkan di negara-negara berkembang seperti Indonesia masih sangat terbatas sekali masyarakat yang melakukan investasi karena rendahnya pendapatan mereka. Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai peranan penting dalam upaya meningkatkan ekonomi Indonesia. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen dari pendapatan nasional. Maka dalam upaya melihat seberapa jauh peranan pengeluaran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi di era orde baru dan era reformasi, maka dilihat dari pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional (Product Domestic Brutto). Pengeluaran pemerintah terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Oleh karena itu variabel independent adalah pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan variabel dependen adalah pendapatan nasional (PDB). Hasil regresi menunjukkan R square sebesar 0,991 untuk era orde baru, menunjukkan PDB dipengaruhi oleh pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sebesar 99,1% dan selebihnya 0,9 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model regresi. Sedangkan untuk reformasi R square 0,955 berarti 95,5 % menunjukkan PDB dipengaruhi oleh pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan selebihnya 4,5 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model regresi. Uji F untuk era orde baru sebesar 1409,732 dan era reformasi 21.279 lebih besar daripada F table berarti secara keseluruhan pengaruh variabel independent signifikan terhadap variabel dependen.

* Budi Indrawati, Dosen Fakultas Ekonomi Ubhara Jaya

Pendahuluan

Dalam era globalisasi ini peranan pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi merupakan kunci untuk menuju masyarakat yang lebih makmur, karena itu peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia harus benar-benar aktif dan positif. Masalah di negara berkembang begitu besar dan masalah itu tidak bisa diserahkan begitu saja pada mekanisme bebas kekuatan-kekuatan ekonomi. Karena kekuatan perusahaan swasta belum cukup mampu menyelesaikan masalah yang berat tersebut. Oleh karena itu tindakan pemerintah benar-benar sangat dibutuhkan bagi pembangunan ekonomi negara berkembang.

Perkembangan ekonomi selalu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita, karena pendapatan perkapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tersebut, pemerintah memerlukan dana atau anggaran yang sangat besar, dana tersebut tercermin dalam pengeluaran pemerintah. Di Indonesia dana atau anggaran tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN dapat diketahui berapa rencana dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Pendapatan pemerintah Indonesia dihasilkan dari berbagai macam penerimaan seperti pajak, penjualan hasil bumi, minyak mentah, gas alam dan lain-lain. Pendapatan ini dipergunakan untuk biaya pengeluaran mulai dari pembayaran gaji pegawai negara, tentara, pembelian senjata, pembangunan dan lain-lain. Bila pengeluaran pemerintah lebih besar dari pada penerimaan disebut *deficit* anggaran dan jika pengeluaran sama dengan pengeluaran pemerintah disebut dengan anggaran berimbang. Untuk

menutupi kekurangan defisit anggaran, pemerintah meminjam dana dari luar negeri.

Anggaran pengeluaran pembangunan dalam APBN memberikan gambaran mengenai peranan sector pemerintah dalam pembiayaan investasi nasional, yang sekaligus mencerminkan strategi kebijaksanaan fiscal dalam mempengaruhi alokasi sumber daya ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan berusaha dan berbagai program pembangunan lainnya, memperbaiki pemerataan distribusi pendapatan, serta menunjang program stabilisasi, termasuk program penyelamatan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Nota Keuangan & RAPBN 1999/2000). Maka timbul pertanyaan apakah pengeluaran pemerintah telah menghasilkan manfaat bagi masyarakat banyak?, kelompok masyarakat mana?, apakah kelompok miskin?, apakah bidang pendidikan, kesehatan atau lingkungan ?.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka pengeluaran pemerintah harus mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, menanggulangi kemiskinan, serta dapat meningkatkan pengembangan SDM agar produktifitas kerja meningkat dan sebagainya.

Pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan kenaikan produk domestic bruto (PDB) pada triwulan II tahun 2006 mengalami peningkatan yaitu 5,22% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2005. Sedangkan jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2006 tumbuh 2,2%. Dari sisi penggunaan PDB, pendorong PDB terbesar berasal dari konsumsi pemerintah, pada triwulan I 25,13% dan triwulan II 31,38% (lihat tabel.1). Jadi pendorong pertumbuhan ekonomi ini adalah dari belanja barang pemerintah.

Tabel.1. PDB Triwulan II 2006

Uraian	Pertumbuhan PDB (dalam %)	PDB Harga Berlaku (Rp Triliun)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,99	517,9
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	31,38	70,2
Pembentukan Modal Tetap Bruto (Investasi)	0,98	172,3
Ekspor Barang dan Jasa	11,30	243,3
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	8,31	211,8
PDB	5,22	803,4

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Dalam hubungan ini dapat disimpulkan bahwa untuk menaikkan pembangunan ekonomi membutuhkan dana relative besar, sedangkan di negara-negara berkembang seperti Indonesia masih sangat terbatas sekali masyarakat yang melakukan investasi karena rendahnya pendapatan mereka. Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai peranan penting dalam upaya meningkatkan ekonomi Indonesia.

APBN di era reformasi ini telah mengalami perubahan, baik perubahan nama pos-pos nya, maupun dalam susunan pos-posnya, seperti pada pos pengeluarannya, walaupun tidak dalam perubahan besar, namun dapat diartikan bahwa telah terjadi perubahan yang mendasar dalam pemerintahan. Perubahan ini dibedakan atas dua, yaitu pertama era orde baru dan kedua era reformasi. Era orde baru dimulai dari Pelita I 1969/70

s/d Pelita VI 1998/99. Sedangkan era reformasi dimulai dari 1999/2000 sampai sekarang.

Pada tabel 2 terlihat bahwa ada perubahan nama pos-pos pada APBN, seperti sebelumnya pos penerimaan pembangunan yang merupakan pinjaman luar negeri dimasa orde baru, sekarang berubah menjadi nama pos hibah. Pos pengeluaran di era orde baru telah dirubah di era reformasi menjadi dua pos, yaitu pos pengeluaran pusat dan pos pengeluaran untuk daerah. Sementara itu tahun yang digunakan dalam APBN sejak Pelita I sampai Pelita VI adalah tahun anggaran dalam milyar rupiah, sedangkan sejak tahun 2000 sampai sekarang digunakan tahun kalender dalam triliun rupiah.

Sejak tahun 2005 mulai diterapkan Anggaran Belanja Terpadu yaitu menyatukan Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Belanja Pembangunan. Bertitik tolak dari uraian di atas, tulisan ini akan melihat bagaimana dan seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi di era orde baru dan era reformasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa jauh perubahan pada pos-pos APBN setelah era orde baru, dan mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua periode, yaitu periode orde baru (1969/1970 sampai 1998/1999) dan periode era reformasi (1999/2000 sampai 2004).

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut: adanya pengaruh antara pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (investasi pemerintah) terhadap pendapatan nasional.

Tinjauan Pustaka

Ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai diterbitkan kembali tahun 1966, Pemerintahan Orde Baru menggunakannya dalam Pelita I yang dimulai tahun anggaran 1969/1970. Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua golongan utama yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Secara garis besar penggolongan ini mendekati klasifikasi pengeluaran ke dalam pos-pos pengeluaran lancar dan pos-pos pengeluaran kapital. Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran penyelenggaraan pemerintah sehari-hari seperti belanja negara, sedangkan pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik seperti pembangunan jalan, jembatan dan lain-lainnya (Anne Booth & Peter Mc.Cawley,1982:187).

Pembiayaan bagi seluruh pengeluaran investasi pemerintah dalam anggaran belanja pembangunan bersumber dari dalam negeri berupa tabungan pemerintah (selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin), dan pinjaman luar negeri. (Nota Keuangan & RAPBN 1999/2000). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pembangunan merupakan investasi pemerintah, karena investasi adalah pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi. (Sadono Sukirno:366).

Pemerintah mempunyai peran dalam melaksanakan kegiatan perekonomian, umumnya kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut lebih ditujukan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan pembangunan ekonomi diartikan sebagai terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan dari pendapatan nasional yang terjadi dari tahun ke tahun. Sementara itu pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen dari pendapatan nasional. Maka dalam upaya melihat peranan pengeluaran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, maka dilihat dari pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional (*Product Domestic Brutto*).

Model Analisis

Untuk melihat hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi diperlukan model. Model yang digunakan adalah *Model Keynes* yaitu persamaan identitas atau disebut Identitas pos pendapatan nasional (*national income accounts identity*) (N.Gregory Mankiw, 2003 : 25).

$$Y = C + I + G + (X - M) \quad (1)$$

Dimana :

Y	=	Pendapatan nasional (<i>National Income</i>)
C	=	Konsumsi Masyarakat (<i>Consumption</i>)
I	=	Investasi Perusahaan (<i>Pembentukan Modal Domestik Bruto</i>)
G	=	Pembelian Pemerintah (<i>Government Purchases</i>)
X - M	=	Ekspor Netto

Persamaan di atas menjelaskan bahwa konsumsi masyarakat, investasi perusahaan, pembelian pemerintah dan ekspor mempunyai hubungan searah atau positif terhadap pendapatan nasional, yang artinya jika konsumsi, investasi, pembelian pemerintah dan ekspor meningkat maka

pendapatan nasional akan meningkat dan sebaliknya, hanya impor yang mengurangi pendapatan nasional.

Investasi perusahaan merupakan investasi perusahaan swasta (I_s) dan investasi perusahaan pemerintah (I_p), maka :

$$I = I_s + I_p \quad (2)$$

Dengan memasukkan persamaan (2) ke dalam persamaan (1) akan diperoleh persamaan :

$$Y = C + I_s + I_p + G + (X - M) \quad (3)$$

Pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk membiayai kegiatannya terbagi dua yaitu : Pengeluaran Rutin atau Pembelian Pemerintah (G) dan Pengeluaran Pembangunan yang disebut pula dengan Investasi Pemerintah (I_p). Dari persamaan (3) dapat pula ditulis sebagai berikut :

$$Y = C + I_s + (I_p + G) + (X - M) \quad (4)$$

Kemudian persamaan (4) ditulis dalam bentuk hubungan fungsional sebagai berikut :

$$Y = f(G, I_p) \quad (5)$$

Untuk keperluan estimasi, maka fungsi persamaan di atas diubah menjadi bentuk persamaan linier. Persamaan linier tersebut didapatkan dari tranformasi dalam bentuk logaritma. Secara keseluruhan fungsi persamaan menjadi sebagai berikut :

$$Y = a_0 + b_1 G + b_2 I_p + U \quad (6)$$

Dimana :

- Y = Pendapatan Nasional (PDB)
G = Pengeluaran Rutin
Ip = Pengeluaran Pembangunan (Investasi Pemerintah)
a₀ = Konstanta
b₁ = Koefisien regresi
b₂ = Koefisien regresi
U = Variabel gangguan (*disturbance terms*)

Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat *explanatory* yang digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Variabel tidak bebas dalam hal ini adalah pendapatan nasional (PDB) sedangkan variabel bebas adalah pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan (investasi pemerintah).

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data pendapatan nasional atau PDB diperoleh dari Statistik Indonesia (beberapa tahun penerbitan) oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Adapun data APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) khususnya pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, diambil dari Nota Keuangan & RAPBN (beberapa tahun penerbitan) oleh Departemen Keuangan.

Data yang dianalisa untuk era orde baru dimulai dari tahun 1969/70 sampai 1998/1999, sedangkan data untuk era reformasi dimulai tahun 1999/2000 sampai tahun 2004. Karena mulai tahun 2005 kebijakan pemerintah adalah menggabung data pengeluaran rutin dan data pengeluaran pembangunan menjadi satu yaitu data pengeluaran pemerintah.

Pembahasan Hasil Penelitian

Analisa Regresi, untuk mempermudah perhitungan analisis kuantitatif digunakan perhitungan dengan bantuan program SPSS, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel.9. Hasil perhitungan SPSS versi 12.0

Variabel Bebas	Koefisien Regresi Orba	Koefisien Regresi Reformasi	t test Orba	t test Reformasi	Sig. Orba	Sig. Reformasi
Constanta	-4140.788	-226.596	-0.507	-0.593	0.616	0.613
G	4.545	4.337	5.659	1.910	0.000	0.196
Ip	6.063	21.490	3.780	4.149	0.001	0.053

	Orde Baru	Reformasi
R Squared	0.991	0.955
F Test	1409.732	21.279
DW Test	0.573	1.452

Dari data hasil perhitungan SPSS diperoleh persamaan regresi linier orde baru sebagai berikut :

$$Y = 4140.788 + 4.545 G + 6.063 Ip + U$$

Hasil regresi menunjukkan nilai Koefisien Determinasi atau R Square sebesar 0.991. Berarti 99,1 % PDB dapat dijelaskan oleh variable pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan (investasi pemerintah) dan sekitar 0.9 % dijelaskan oleh sebab lainnya.

Hasil perhitungan SPSS untuk data era reformasi sebagai berikut :

$$Y = -226.596 + 4.337 G + 21.490 Ip + U$$

Hasil regresi menunjukkan nilai Koefisien Determinasi atau R Square sebesar 0.955. Berarti 95,5 % PDB dapat dijelaskan oleh variabel pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan (investasi pemerintah) dan sekitar 4.5 % dijelaskan oleh sebab lainnya. (untuk *variable independent* lebih dari dua, maka koefisien determinasi yang digunakan adalah Adjusted R2 . Singgih. 2003.354).

Kesimpulan semakin tinggi R Square akan semakin baik bagi model regresi, karena *variable independent* dapat menjelaskan *variable dependen* lebih besar. Besarnya hubungan antar variabel PDB dengan pengeluaran rutin yang dihitung dengan koefisien korelasi 0,993 pada era orba dan 0.754 pada reformasi serta hubungan yang positif, menunjukkan semakin besar pengeluaran rutin menyebabkan akan bertambahnya PDB, demikian pula sebaliknya, dengan angka korelasi lebih besar dari 0,5 menunjukkan hubungan yang kuat.

Angka probabilitas produk memberikan hasil 0,0000 untuk orba maupun reformasi atau praktis nol. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka korelasi antara PDB dengan pengeluaran rutin sangat nyata. (Singgih.2003.) (lihat lampiran pada tabel correlations baris Sig/Signifikan). Begitu pula korelasi antar variabel PDB dengan variabel pengeluaran pembangunan menunjukkan hubungan yang positif dengan angka koefisien korelasi 0,990 untuk era orba dan 0.934 era reformasi serta hubungan yang positif, menunjukkan semakin besar pengeluaran pembangunan menyebabkan akan bertambahnya PDB, demikian pula sebaliknya. Angka korelasi lebih besar dari 0,5 menunjukkan hubungan yang kuat. Angka probabilitas sebesar nol juga lebih besar dari 0,05, berarti semua variabel independen berkorelasi kuat terhadap PDB. Koefisien Regresi, Nilai konstanta sebesar -4140,788, menunjukkan bahwa PDB akan berkurang sebesar 4140,7880 point, jika nilai variabel independen sebesar

nol. (Lihat tabel *Coefficients* pada kolom *Unstandardized Coefficients* model ketiga dalam lampiran). Koefisien regresi pengeluaran rutin sebesar 4,345 di era orba dan 4.337 era reformasi dengan tanda positif, menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran rutin sebesar satu point akan mengakibatkan kenaikan PDB di era orba sebesar 4,345 point dan era reformasi 4.337 dengan *ceteris paribus* (variabel independen lainnya konstan).

Koefisien regresi pengeluaran pembangunan era orba sebesar 6,063 dan era reformasi 21.490 dengan tanda positif, menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pembangunan sebesar satu point akan mengakibatkan kenaikan PDB sebesar 6,063 point era orba dan 21.490 era reformasi dengan *ceteris paribus* (variabel independen lainnya konstan).

Untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai variabel dependen dapat dilihat dari hasil *t* hitung. (Lampiran Hasil SPSS tabel *Coefficients* pada kolom *t* model ketiga). $H_0 : \mu = 0$ (tidak ada hubungan) dan $H_1 : \mu \neq 0$ (ada hubungan) *t* hitung terhadap variabel pengeluaran rutin di era orba adalah sebesar 5,659 dengan $\alpha = 5\%$ dapat diketahui *t* tabel sebesar $t(\alpha/2; n-k-1) = t(0,025; 27) = 2,052$, berarti *t* hitung 5,659 lebih besar dari *t* table 2,052, berarti hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima, ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel pengeluaran rutin signifikan terhadap PDB. *t* hitung terhadap variabel pengeluaran rutin di era reformasi adalah sebesar 1,910 dengan $\alpha = 5\%$ pengaruh variabel pengeluaran rutin tidak signifikan terhadap PDB namun dengan $\alpha = 20\%$ dapat dilihat *t* tabel sebesar $t(\alpha/2; n-k-1) = t(0,10; 2) = 1,886$, dimana *t* hitung 1,910 lebih besar dari *t* table 1,886, berarti hipotesis H_0 tolak dan H_1 diterima, ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel pengeluaran rutin signifikan terhadap PDB.

t hitung terhadap variabel pengeluaran pembangunan pada era orba adalah sebesar 3,780, signifikan pada $\alpha = 5\%$, ini berarti t hitung 3,780 lebih besar dari t tabel 2,052, maka hipotesis H0 ditolak (H1 diterima), ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel pengeluaran rutin signifikan terhadap PDB.

t hitung terhadap variabel pengeluaran pembangunan di era reformasi adalah sebesar 4,149 dengan $\alpha = 10\%$ pengaruh variabel pengeluaran pembangunan signifikan terhadap PDB, dapat dilihat t tabel sebesar $t(\alpha/2; n-k-1) = t(0,05; 2) = 2,920$, dimana t hitung 4,149 lebih besar dari t tabel 2,920, berarti hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima, ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel pengeluaran pembangunan signifikan terhadap PDB.

Berdasarkan angka probabilitas, menunjukkan probabilitas semua variabel lebih kecil dari 0,05, berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika angka probabilitas $> 0,05$, maka H0 diterima, Jika angka probabilitas $< 0,05$, maka H0 ditolak (Lihat tabel *Coefficients* pada kolom Sig model ketiga dalam lampiran). Uji F Untuk mengetahui apakah secara bersama variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen, dilakukan uji distribusi F, yaitu membandingkan nilai F tabel pada tabel *Analysis of Variance* (ANOVA) dengan F hitung. Dari pengolahan SPSS diperoleh F hitung era orba sebesar 1409,732 dan dengan tingkat kepercayaan 5% maka $F(\alpha; k; n-k-1) = F(0,05; 2, 27) = 3,35$. Sedangkan F hitung era reformasi sebesar 21,279 dan dengan tingkat kepercayaan 5% maka $F(\alpha; k; n-k-1) = F(0,05; 2, 2) = 19,00$. Berarti F hitung $1409,732 > F$ tabel 19,00 (Lihat tabel Anova pada kolom F model ketiga dalam lampiran). Ini memberikan arti bahwa F hitung lebih besar dari pada F tabel, berarti hipotesis H0 ditolak, dengan kata lain bahwa terdapat hubungan antara *variabel independent* dengan variabel dependen

dan secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa kedua variabel independen tersebut berpengaruh terhadap nilai variabel dependen, berarti persamaan regresi adalah signifikan dan dianggap mempunyai keberartian. Dari angka probabilitasnya 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 berarti model regresi dapat dipakai untuk memprediksi PDB atau dapat dikatakan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDB, baik untuk orba maupun untuk reformasi. (Lihat tabel Anova pada kolom Sig. model ketiga dalam lampiran).

Uji Autokorelasi, Hasil pengolahan SPSS untuk *Uji Autokorelasi* dengan *Uji Durbin-Watson* (DW) era orba memberikan hasil sebesar 0,573. (Lihat tabel Model Summary pada kolom *Durbin-Watson* model ketiga dalam lampiran). Nilai tabel dengan mengambil taraf signifikan sebesar 5% ($n = 30$ dan $k = 2$). diperoleh $D_{0,05, U} = 1,567$ dan $D_{0,05, L} = 1,284$, berarti nilai DW hitung lebih kecil daripada DW tabel, maka H_0 ditolak, menunjukkan bahwa dalam model persamaan regresi ini ada otokorelasi.

Adanya otokorelasi menunjukkan model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai *variabel independent* tertentu. Hal ini biasanya muncul pada observasi yang menggunakan data *time series*. Salah satu cara untuk menghilangkan pengaruh otokorelasi tersebut adalah dengan memasukkan lag variabel dependennya ke dalam model regresi. (Algifari, 2000:91).

Penelitian disini menggunakan data *time series*, oleh karena ada otokorelasi maka untuk menghilangkannya ditambah data variabel independen PDB t-1 sehingga diperoleh bentuk persamaan regresi era orde baru sbb :

$$Y_t = -2754,727 + 3,262 G + 3,452 Ip + 0,403 Y_{t-1} + U$$

(4,397) (2,155) (3,222)

R Square = 0,993

F Test = 1269.884

DW Test = 1.390

Hasil pengolahan SPSS untuk uji autokorelasi dengan *Uji Durbin-Watson* (DW) memberikan hasil sebesar 1,390 dengan mengambil taraf signifikan sebesar 5% ($n=30$ dan $k=3$), diperoleh $D_{0,05, U} = 1,650$ dan $D_{0,05, L} = 1,214$, berarti nilai $D_L < DW < D_U$, maka artinya tidak dapat diambil kesimpulan. Untuk data reformasi tidak dapat dilihat DW tabel karena tidak tersedia ditabel untuk data $n = 5$.

$$Y_t = -190,478 + 3,914 G + 2,585 Ip + 0,686 Y_{t-1} + U$$

(3.035) (0.297) (2.309)

R Square = 0,993

F Test = 46.670

DW Test = 2.843

Uji Multikolinieritas dengan melihat nilai dari *Varian Inflasi Factor* (VIF) (Lihat tabel *Coefficients* pada kolom *Collinearity Statistics* model ketiga dalam lampiran). Ternyata dari masing-masing variabel independent tersebut nilai VIF untuk era orba sebesar 31,887 berarti lebih besar dari 5, memberikan arti bahwa efek multikolinieritas merupakan permasalahan yang berarti. Sedangkan untuk era reformasi nilai VIF sebesar 1,438 yang berarti lebih kecil dari lima, berarti : jika $VIF > 5$, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel independen lainnya (Singgih.2003.357).

Uji multikolinieritas dengan melihat *index condition*, (Lihat tabel *Collinearity Diagnostics* pada kolom *Condition Index* model ketiga dalam lampiran). Jika condition indek $>$ dari 30, menunjukkan multikolinieritas

benar-benar serius, Jika condition index > dari 15, berarti multikolinieritas akan terjadi. Di era orba nilai condition index yang diperoleh semua variabel berada di bawah 30, berarti masih belum merupakan hal yang serius. Untuk era reformasi nilai condition index < 30.

Uji multikolinieritas dengan melihat *eigenvalue*, (Lihat tabel *Collinearity Diagnostics* pada kolom *Eigenvalue* model ketiga dalam lampiran). Jika *eigen value* mendekati nol akan terjadi multikolinieritas. Hasil SPSS menunjukkan *eigen value* masih jauh dari nilai nol, oleh karena itu secara keseluruhan hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa model regresi bebas dari multikolinieritas.

Hasil SPSS dalam bentuk grafik atau *chart* bertujuan untuk menganalisis apakah syarat persamaan regresi dipenuhi, yaitu persyaratan normalitas, dengan melihat Kurva Normal Probability Plot (Normal P-P) dilampiran. Jika residual berasal dari distribusi normal, maka nilai-nilai sebaran data akan terletak di sekitar garis lurus. Terlihat bahwa sebaran data pada chart tersebar disekeliling garis lurus tersebut (tidak terpencah jauh dari garis lurus), maka dapat dikatakan bahwa persyaratan normalitas bisa dipenuhi.

Kesimpulan dan Saran-saran

Campur tangan pemerintah dalam bentuk pengeluaran pemerintah sangat diperlukan bagi Indonesia. Kedua pengeluaran pemerintah tersebut yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pendapatan nasional (PDB), ditunjukkan oleh nilai R Square yang mendekati satu dan Uji F cukup signifikan. Dengan naiknya PDB maka pertumbuhan ekonomi meningkat, mengindikasikan bahwa naiknya kegiatan ekonomi nasional berarti meningkatnya kegiatan program-program pemerintah seperti dibidang

tenaga kerja yaitu menambah lapangan pekerjaan, bidang kesehatan, pendidikan SDM dan sebagainya.

Pengeluaran pemerintah semakin meningkat setiap tahun baik orde baru maupun era reformasi menunjukkan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan berarti semakin besar dana bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Saran-saran. Untuk memenuhi dana yang semakin besar, disarankan pemerintah meningkatkan tabungannya, yang berasal dari penerimaan pajak dan non pajak, dan kekurangan dana ditambah dari pinjaman luar negeri. Bantuan luar negeri dapat dibenarkan asal diperoleh dengan bunga yang disesuaikan dengan kemampuan. Maka melihat hal ini tidak ada alasan bagi Indonesia menghentikan pinjaman luar negeri untuk membiayai sebagian pengeluaran pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, Analisis Regresi: Teori, Kasus dan Solusi, Ed.2, BPFE, Yogyakarta, 2000.
- Arsyad, Lincoln, *Ekonomi Pembangunan*, Ed.4, STIE YKPN, Yogyakarta, 1999.
- Booth, Anne dan Peter Mc. Cawley, *Ekonomi Orde Baru*, Terjemahan, LP3ES, Jakarta, 1982.
- Badan Statistik Indonesia, *Statistik Indonesia*, beberapa tahun penerbitan, BPS, Jakarta, 2004.
- Basalim, Umar dkk, *Perekonomian Indonesia: Krisis dan Strategy Alternatif*, UNAS & Cidesindo, Jakarta, 2000.

Departemen Keuangan RI, *Nota Keuangan dan RAPBN 1988/1989, 1994/1995 dan 1999/2000 dan 2001*. Jakarta, 2001.

Dornbusch, Rudiger dan Stanley Fischer, *Makro Ekonomi*, Ed.3, Terjemahan, Erlangga, Jakarta, 1986.

J.Supranto, *Statistik, Teori dan Aplikasi*, Ed.6, Jilid 1 dan 2, Erlangga, Jakarta, 2000.

Latief Dochak, *Pembangunan Ekonomi & Kebijakan Ekonomi Global*, Cet.2, Univ. Muhammdiyah Surakarta, 2001.

Mankiw, N.Gregory, *Teori Makro Ekonomi*, Ed.5, Terjemahan, Erlangga, Jakarta, 2003.

Prajitno, Hadi & Budi Santoso, *Ekonomi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.

Santoso, Singgih, *SPSS Versi 10.00, Mengolah Data Statistik Secara Profesional*, Cet.4, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.

Suryana, *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.

Todaro, Michael, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Terjemahan, Ed.4, Erlangga, Jakarta, 1994.

Wahana Komputer, *10 Model Penelitian dan Pengolahannya dengan SPSS 10,01*, Andi Offset, Jogjakarta, 2002.